

POLITIK DIGITAL: STRATEGI POLITIK ELEKTORAL PARTAI POLITIK DALAM KAMPANYE PEMILU PRESIDEN

Novance Silitonga
Dosen Ilmu Politik Universitas Bung Karno

Franky P. Roring
Dosen Ilmu Politik Universitas Bung Karno

Abstrak

Pertarungan politik elektoral mengalami pergeseran tatkala pertarungan tersebut berada dalam jagat digital. Pertarungan politik yang dilakukan secara tradisional dengan yang tidak tradisional dengan memanfaatkan teknologi telah membawa hasil elektoral yang berbeda pula. Efisiensi waktu, tenaga, dan uang menjadi hal penting dalam politik yang menempatkan teknologi sebagai instrumen atau yang acapkali disebut sebagai politik digital. Tahapan kampanye merupakan tahapan yang dampaknya paling terasa dalam politik digital. Dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi internet maka partai politik dan para pendukung satu pasangan calon presiden mampu meyakinkan sebanyak mungkin pemilih yang tersebar pada satu daerah pemilihan yang luas yaitu satu negara.

Dalam konteks demokrasi, praktek politik digital ini dipandang sebagai langkah inovatif yang memunculkan perdebatan. Di satu pihak ada yang mendukung bahwa politik digital memberi kemudahan dalam berinteraksi seluas mungkin ke masyarakat, namun pihak lain ini dianggap sebagai sesuatu yang memberi kebebasan sekaligus penguasaan.

Kata Kunci: Politik digital, partai digital, demokrasi digital, kampanye dan strategi politik.

PENDAHULUAN

Pembahasan pemilihan umum di Indonesia selalu mendapat perhatian dan menjadi diskursus-diskursus penting politik. Di Indonesia banyak jenis pemilu diselenggarakan seperti Pemilu Legislatif (Pileg) bertujuan memilih anggota DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Daerah atau pemilukada menentukan siapa yang berhak memegang kekuasaan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahkan dalam perebutan kekuasaan puncak yaitu Presiden dilakukan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Jika mencermati aspek partisipasi pemilih, jumlah pemilih yang hadir dalam menggunakan hak konstitusionalnya di TPS lebih tinggi pada perhelatan Pilpres dibandingkan Pileg. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa pemilihan presiden menjadi puncak pertarungan perebutan kekuasaan yang menyita banyak perhatian.

Di dunia internasional, pemilu Indonesia dianggap sebagai pemilu yang secara teknis sangat rumit dilakukan bahkan dari sisi pembiayaan, pemilu yang paling mahal di dunia. Lowy Institute yang berbasis di Australia misalnya mengatakan pemilu yang rumit tersebut hanya

dilaksanakan dalam satu hari saja.¹ Dengan kerumitan tersebut proses pemungutan dan penghitungan suara sampai rekapitulasi hasil perolehan suara dilakukan secara manual dan berjenjang serta begitu banyak sumber daya manusia dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia.² Inilah mengapa banyak pihak-pihak terkait yang berkepentingan dalam pemilu selalu menyerukan agar biaya pemilu yang super mega tidak diselewengkan dan digunakan sesuai peruntukannya berdasarkan undang-undang. Berbagai terobosan dilakukan agar secara teknis tahapan penyelenggaraan pemilu dapat dipersingkat.

UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mengatur penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dilakukan secara bersamaan waktunya antara pilpres, pileg, pemilihan DPD dan pemilukada.³ Undang-undang tegas mengatur bahwa yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR dan DPRD, perseorangan untuk DPD dan pasangan calon presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Partai politik bertumbuh dengan cepat pasca kebebasan hadir mengisi kehidupan demokrasi di Indonesia. Pertumbuhan partai politik tersebut juga sering disebabkan karena dualisme kepengurusan akibat konflik internal partai yang tidak kunjung menemukan titik damai. Sehingga mereka yang dinyatakan secara hukum tidak berhak atas kepengurusan partai, memilih untuk mandiri dan mendirikan partai politik baru yang memiliki karakter yang sama secara ideologi.

Dalam Pilpres, partai politik menjadi sentral dalam pencalonan. Tidak ada organisasi lain yang dianggap sah dalam mengusulkan pasangan calon presiden selain partai politik atau gabungan parpol. Untuk itu partai politik harus jeli dan hati-hati mengusulkan siapa calon yang

¹ Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilu 2019 lalu terdapat sebanyak 193 Juta orang pemilih dengan 809.500 TPS dan setiap TPS melayani sekitar 200-300 orang pada hari pemungutan suara. Jumlah caleg yang berkompetisi sebanyak 245 ribu orang untuk mengisi sebanyak 20.500 kursi yang ada di 34 Provinsi dan 500 Kabupaten/Kota dan sebanyak 575 orang anggota DPR dari 16 partai politik peserta pemilu. Data diolah dari laman KPU (www.kpu.go.id).

² DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu menyepakati biaya penyelenggaraan pemilu 2024 sebesar 76,6 Triliun. Angka ini sangat fantastis kenaikannya dibanding biaya pemilu sebelumnya yakni sebesar 16 Triliun pada tahun 2014 dan 25,58 Triliun pada tahun 2019. Data diolah penulis dari berbagai sumber media.

³ Berdasarkan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu, Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 sedangkan Pemilukada serentak di seluruh Indonesia akan diselenggarakan pada 27 November 2024.

memiliki keterpilihan elektoral yang tinggi⁴. Saat ini partai politik menunggu momen terbaik dalam mendeklarasikan calon presiden yang diusung.⁵

Partai politik menyadari sepenuhnya bahwa tantangan Pilpres kedepan semakin besar. Partai politik harus memiliki kemampuan untuk mencitrakan dirinya sebagai representasi rakyat yang dapat dipercaya dan oleh karenanya calon presiden yang diusung juga kredibel dan dapat diandalkan. Kampanye merupakan salah satu tahapan pemilu yang digunakan partai politik dalam mencitrakan diri dan calon presiden yang diusungnya. Dalam kampanye, partai politik atau pihak lain yang ditunjuk oleh partai politik berusaha menarik preferensi pemilih.

Di satu sisi, pemilih juga sudah semakin cerdas untuk melacak rekam jejak calon presiden yang disajikan oleh partai politik. Tak jarang calon yang diajukan dianggap pemilih sebagai calon yang gagal,⁶ bermain politik identitas,⁷ tak akan membawa banyak perubahan yang signifikan.⁸ Apapun penilaian pemilih terhadap figur-figur yang dicalonkan sebagai calon presiden, pemilih hanya memilih dua pilihan yaitu memilih dari calon-calon yang diajukan partai politik atau tidak menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih.

Tugas berat partai politik lebih kepada bagaimana mengenalkan calon presiden yang diusung melalui aktivitas kampanye. Mengacu kepada tahapan penyelenggaraan pemilu yang disusun KPU, kampanye memiliki durasi terbatas. Untuk pemilu 2024, KPU membatasi masa

⁴ Keterpilihan elektoral calon presiden biasanya disajikan oleh beragam survei-survei politik yang dibuat oleh para konsultan politik dan hasil survei mereka dipublikasikan di berbagai media online. Salah satu alasan yang membuat Partai Nasdem lebih awal mencalonkan calon presiden adalah karena Anies Baswedan masuk dalam nominasi calon presiden yang memiliki tingkat keterpilihan elektoral yang tinggi setelah nama lainnya yang sering disebut yaitu Prabowo Subianto diusung Partai Gerindra dan Ganjar Pranowo diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

⁵ Partai Nasdem adalah partai politik yang lolos verifikasi KPU untuk menjadi partai politik peserta pemilu 2024. Partai ini mengambil langkah awal untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem pada 3 Oktober 2022. Sebelumnya 12 Agustus 2022, Prabowo Subianto menerima mandat dari Partai Gerindra untuk dicalonkan menjadi calon presiden dalam sebuah Rapimnas di Bogor. Pencalonan lebih awal ini memunculkan pro dan kontra dari masyarakat.

⁶ Prabowo Subianto misalnya punya rekam jejak mengikuti kontestasi pemilihan presiden. Pada tahun 2004, maju dalam Konvensi Partai Golkar, tahun 2009 duet dengan Megawati Sukarnoputri, tahun 2014 menggandeng Hatta Rajasa dan terakhir pada tahun 2019 beliau tandem bersama Sandiaga Uno. Dari kontestasi tersebut, tak satupun Prabowo Subianto mampu meyakinkan pemilih bahwa ia layak dan patut dipercaya sebagai presiden. Ini pulalah alasan mengapa Prabowo Subianto diasosiasikan sebagai presiden gagal

⁷ Anies Baswedan adalah figur yang dikaitkan dengan orang yang memanfaatkan isu-isu identitas sebagai pragmatisme politik elektoralnya. Ia dianggap membiarkan terjadinya polarisasi ditengah masyarakat khususnya pada perhelatan pemilihan kepala daerah Jakarta tahun 2017. Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/18/11155931/anies-baswedan-diminta-tak-bermain-politik-identitas>.

⁸ Figur Ganjar Pranowo dianggap sebagai penerus Presiden Jokowi yang tak membawa perubahan apapun selain meneruskan dan melanjutkan program-program revolusi mental Presiden Jokowi. Namun survey yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menempatkan Ganjar sebagai capres teratas. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/10/10182151/masyarakat-yang-puas-dengan-kinerja-jokowi-cenderung-pilih-ganjar-ketimbang>

kampanye kurang lebih 3 bulan yaitu mulai November 2023 hingga awal Februari 2024. Setengah semester menjadi pertarungan penting bagi para calon presiden untuk meraih kepercayaan pemilih. Strategi politik elektoral partai dalam kampanye pilpres menjadi indikator apakah tingkat keterpilihan calon presiden yang diusung besar atau kecil.

Secara global kehidupan dan aktivitas politik dunia saat ini sangat tergantung pada penggunaan teknologi dalam mendapatkan informasi dan menjalin komunikasi yang dimediasi oleh perangkat internet. Kehadiran internet mengubah banyak hal dalam kehidupan politik dimana saja. Dengan internet dunia terkesan tanpa batas dan tanpa waktu (*borderless and timeless*). Melalui internet dunia politik dimediasi ulang dalam ruang-ruang virtual dan realitas empirik dimediasi ulang oleh teknologi hingga melahirkan sebuah realitas baru.⁹ Dalam konteks kampanye pilpres, partai politik diperhadapkan dengan dunia yang sedang berubah itu. Kehidupan politik menjadi semakin terdigitalisasi (*e-politic*) oleh keberadaan perangkat teknologi yang semakin mutakhir dan terjangkau oleh khalayak.

Berbagai pertemuan-pertemuan politik tidak selalu mengandalkan pertemuan langsung yang cenderung tidak efektif dalam waktu dan efisien dalam pembiayaan. e-politik dimaknai sebagai politik digital yang menawarkan sejumlah kemudahan sekaligus ancaman dalam mengekspresikan kebebasan hak-hak politik. Kemudahan-kemudahan yang ditemukan dalam politik digital digunakan dalam upaya maksimalisasi perolehan suara dalam kampanye pilpres oleh partai politik dewasa ini.

Pada akhirnya memang pertarungan politik elektoral mengalami pergeseran tatkala pertarungan tersebut berada dalam jagat digital. Kompetisi politik yang dilakukan secara tradisional dengan yang tidak tradisional melalui penggunaan teknologi telah membawa hasil elektoral yang berbeda pula. Efisiensi waktu, tenaga, dan uang menjadi hal penting dalam politik yang menempatkan teknologi sebagai instrumen atau yang acapkali disebut sebagai politik digital. Tahapan kampanye merupakan tahapan yang dampaknya paling terasa dalam politik digital. Dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi internet maka partai politik dan para pendukung satu pasangan calon presiden mampu meyakinkan sebanyak mungkin pemilih yang tersebar pada satu daerah pemilihan yang luas yaitu satu negara.

Dalam konteks demokrasi, praktek politik digital ini dipandang sebagai langkah inovatif yang memunculkan perdebatan. Di satu pihak ada yang mendukung bahwa politik

⁹ Didik Haryadi Santoso (Ed) dan Dr. Heri Budianto, M.Si (Pengantar).2018. *Media dan Komunikasi Politik: Potret Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Komunikasi Politik*, MBridge Press, hal. v.

digital memberi kemudahan dalam berinteraksi seluas mungkin ke masyarakat, namun pihak lain ini dianggap sebagai sesuatu yang memberi kebebasan sekaligus penguasaan.

POLITIK DIGITAL: TATARAN TEORITIS

Politik digital memiliki hubungan dengan banyak istilah seperti demokrasi digital atau beberapa orang menyebutnya sebagai demokrasi elektronik (*e-democracy*). Politik digital disamakan dengan *internet politics*. Istilah ini berkembang dan sering digunakan di Amerika. Studi-studi oleh ilmuwan politik tentang keterkaitan antara internet dan politik bertumbuh secara luar biasa. Secara literatur, kajian internet dan politik masuk dalam kajian komunikasi politik dan diawal tahun 90-an studi ini semakin berkembang ditandai dengan semakin banyaknya artikel-artikel ilmiah yang muncul dari ilmuwan politik.¹⁰

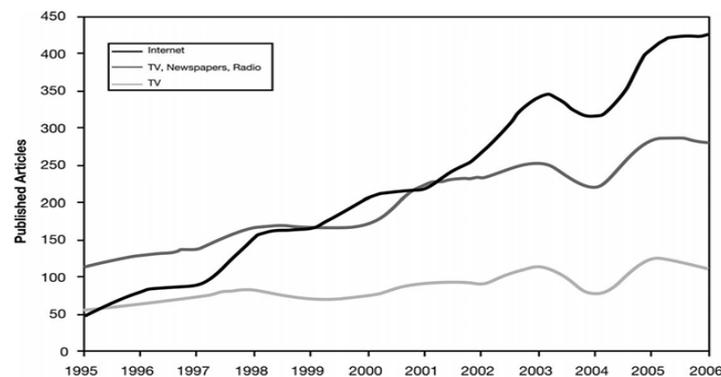


Figure 1.1 Published scholarly articles on political communication, 1995–2006.

Source: Authors' calculations from Boolean searches of article title, abstract and keywords: TS = (Internet OR web) AND TS = (politic* OR govern*); TS = (television OR newspaper* OR radio) AND TS = (politic* OR govern*); TS = (television) AND TS = (politic* OR govern*) in ISI Web of Science scholarly article database 1995–2006, November 8, 2007.

Kemudian internet memiliki pengaruh dan peran menentukan dalam berbagai kampanye di pemilu.¹¹ Kampanye politik yang dilakukan calon melalui *blog* dan video serta email ternyata memiliki dampak yang sangat luas.¹² Pada akhirnya politik dan teknologi internet memiliki hubungan secara dialektis. Artinya hubungan keduanya dapat saling diperdebatkan atau dipertentangkan.

Perdebatan yang acap kali muncul ke permukaan di inisiasi oleh dua klaim yaitu klaim yang mengatakan apakah teknologi memiliki kemampuan untuk membentuk masyarakat dan politik dan klaim yang mengatakan bahwa dampak teknologi dibentuk oleh institusi politik dan

¹⁰ Richard Davis, Jody, Peter and Jonathan S. Morris.2009. *The Internet in the U.S. Election Campaigns*. Dalam Andrew Chadwick and Philip N.Howard (Ed.).2009. *Routledge Handbook of Internet Politics*. hal.2-3

¹¹Nick Anstead and Andrew Chadwick.2009. *Parties, Election Campaigning and the Internet*, Routledge International Handbooks, hal.56.

¹² *ibid.*,hal.56.

institusi sosial.¹³ Kedua klaim ini berangkat dari cara berfikir yang tidak sama dan barangkali kedua klaim ini sama-sama kuat atau sama-sama lemah dan dapat didebat karena ketidaksempurnaan klaim yang diajukan.

Teknologi internet mampu menghadirkan ruang-ruang virtual dan maya. Ruang-ruang virtual itu kemudian diisi oleh para *user* internet dan membentuk institusi politik yang disebut dalam beberapa peristilahan seperti *warganet*, *netizen*, *e-citizen*. Inilah kemudian mengapa teknologi internet dapat digunakan sebagai media komunikasi politik. Pendapat yang berbeda menjelaskan bahwa institusi politik dan institusi sosial telah ada jauh sebelum kehadiran teknologi internet, sehingga teknologi dapat berdampak atau berguna karena institusi politik dan institusi sosial yang telah ada tersebut menggunakannya. Dengan kata lain seolah-olah klaim yang terakhir mengatakan jika institusi politik dan institusi sosial tidak menginginkan teknologi internet tidak ada masalah apapun yang terjadi karena pola-pola komunikasi politik (kampanye) secara konvensional masih dapat dilakukan seperti pertemuan langsung ke akar rumput dan menggunakan televisi.

Politik digital bertalian dengan *computational propaganda*, sebuah terminologi yang memperkenalkan *digital misinformation* dan manipulasi. *Computational propaganda* menggambarkan penggunaan algoritma, otomatisasi dan tindakan kurasi manusia yang mengatur dan menyebarkan informasi yang dapat menyesatkan (*misleading information*) melalui jaringan media sosial.¹⁴ *Computational propaganda* dipahami melalui 2 cara yaitu cara teknis dan cara sosial.¹⁵ Secara teknis dipahami sebagai sebuah fenomena yang berasal dari himpunan platform media sosial, agen otonom, algoritma dan *big data* yang berfungsi memanipulasi opini publik.¹⁶ Ia memiliki seperangkat software (*political bots*) yang menghasilkan teks-teks pesan dan komunikasi secara otomatis di media sosial.

Secara sosial *computational propaganda* melalui perangkat *political bots* berfungsi memberikan citra dan performa pada politisi (calon presiden). Citra dan performa ini dapat bersifat positif maupun negatif. Tergantung pada tujuan dari manipulasi opini itu sendiri. Lawan politik akan dicitrakan tidak sebaik calon atau kandidat yang diusung. Secara sosial *computational propaganda* merepresentasikan sebuah perangkat yang begitu efektif untuk

¹³ *ibid.*,hal.58.

¹⁴ Samuel Wooley and Philip Howard.2019. *Computational Propaganda Worldwide*, Oxford University Press, hal.4.

¹⁵ *ibid.*,hal.5.

¹⁶ *ibid.*,hal.5.

mengendalikan kampanye-kampanye kebencian.¹⁷ Dalam konteks ini, *computational propaganda* yang dimaksud dalam memproduksi kejahatan elektoral. Internet Research Agency, lembaga riset di St. Petersburg, Rusia berafiliasi dengan Presiden Vladimir Putin merancang dan melakukan operasi politik memenangkan Donald Trump dan Partai Republik dengan menciptakan akun-akun palsu dan kerumunan politis di media sosial seperti Facebook, Twitter dan Youtube untuk mempengaruhi pemilihan presiden dan memecah belah masyarakat Amerika.¹⁸

HIRUK PIKUK TAHUN POLITIK

Pemilu akan diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan untuk menyelenggarakan Pileg, DPD, Pemilukada dan Pilpres. Tahapan penyelenggaraan pemilu telah dirilis oleh KPU dan hingga saat tulisan ini dibuat, tahapan yang sedang berlangsung adalah penetapan partai politik peserta pemilu.¹⁹ Mengingat banyaknya tahapan pemilu dan jenis pemilu yang akan diselenggarakan, banyaknya posisi kekuasaan yang akan diperebutkan (anggota legislatif, kepala daerah dan presiden), hampir dipastikan politik Indonesia mengalami hiruk pikuk yang luar biasa. Penulis mengidentifikasi beberapa potensi yang menandakan bahwa hiruk pikuk itu telah terjadi dan mempunyai keterkaitan dengan pencalonan calon presiden dalam Pemilihan Presiden.

Pertama, Parpol tidak lolos verifikasi sebagai partai politik peserta pemilu mengajukan gugatan atau sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan PTUN. Bahkan mereka membentuk kelompok perlawanan “Gerakan Melawan *Political Genocide*” dan meminta KPU menghentikan tahapan pemilu.²⁰ Partai Ummat adalah partai yang melakukan perlawanan ke KPU untuk ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu. Keberadaan partai ini tidak lepas dari figur kuat dan berpengaruh di tengah-tengah kelompok Muslim perkotaan yaitu Amien Rais. Banyak rekam jejak yang dapat dilihat kembali bagaimana figur ini selalu melakukan manuver

¹⁷ *ibid.*, hal.6.

¹⁸ Tentang ini lihat Agus Sudibyo.2019. *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*, Kepustakaan Populer Gramedia, hal.333-334.

¹⁹Partai politik peserta Pemilu 2024 ditetapkan pada 14 Desember 2022 berdasarkan Berita Acara Nomor:30/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik adalah PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), PKS, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Hanura, Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), PAN, PBB, Demokrat, PSI, PPP. Di antara partai politik nasional, ada juga Partai Lokal Aceh yaitu Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Generasi Aceh Beusaboh Taat dan Taqwa (Gabthat), Partai Darul Aceh (PDA), Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh) dan Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA). Lihat laman berita www.setkab.go.id

²⁰<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/23/06160021/parpol-tak-lolos-pemilu-minta-tahapan-pemilu-2024-dihentikan>

politik mengkritik rezim yang sedang berkuasa. Terkadang kritik yang dilontarkan sangat tendensius dan sangat personal²¹. Walaupun belum memenuhi syarat sebagai partai politik yang dapat mencalonkan calon presiden, namun partai ini punya kepentingan yang realistis untuk mendukung calon presiden dari partai politik yang telah memenuhi syarat mencalonkan calon presiden. Gugatan partai politik yang tidak lolos verifikasi KPU mengawali hiruk pikuknya politik Indonesia menjelang pemilu 2024.

Kedua, Perang pernyataan di pusat elit politik. Manuver politik dari elit politik tidak dapat dihindarkan. Tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar sering diumbar di publik demi upaya menarik simpatik masyarakat. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklaim bahwa pemilu 2024 akan dirancang dengan tidak jujur dan adil.²² Lebih lanjut SBY mengklaim bahwa pemilu hanya akan diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Klaim sepihak dan masih berupa dugaan memicu reaksi dari berbagai pihak. Klaim ini tak seharusnya berasal dari seorang mantan presiden yang lebih dituntut menjadi seorang negarawan daripada seorang politisi.

Ketiga, Presiden tiga periode. Perilaku sebagian elit politik yang inkonstitusional ini memancing reaksi dan kemarahan dari Presiden Jokowi dan menuduh telah menampar muka presiden.²³ Jika melihat peta pengusulan presiden tiga periode, terdapat 3 kubu yang mendesak gagasan ini yaitu *Pertama* internal pemerintah yang diwakili oleh para menternya seperti Airlangga Hartarto, Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia. *Kedua*, partai politik yang diwakili oleh Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional serta Partai Solidaritas Indonesia. *Ketiga*, masyarakat diwakili M.Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer dan Baron Danardono Wibowo, Ketua Umum Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024. Apapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pengusung akan mencederai substansi demokrasi yang mengharuskan pembatasan kekuasaan presiden.

Peta Kelompok Pengusul “Presiden 3 Periode”

Kelompok Pengusul	Nama Pengusul	Alasan Usulan
--------------------------	----------------------	----------------------

²¹<https://populis.id/read16881/kendati-tendensius-dan-menyerang-pribadi-kritik-amien-rais-buat-jokowi-luhut-diapresiasi-substansinya-bagus>

²²<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/17/18410901/sby-saya-harus-turun-gunung-ada-tanda-tanda-pemilu-2024-bisa-tidak-jujur>

²³<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/02/13504991/presiden-jokowi-pengusul-presiden-3-periode-ingin-menampar-muka-saya?page=all>

Internal Pemerintah	Airlangga Hartarto.	Perpanjangan masa jabatan presiden diterima dari petani di Kabupaten Siak Provinsi Riau
	Luhut Binsar Panjaitan.	Kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan sehingga pemilu dikhawatirkan mengubah situasi politik saat ini.
	Bahlil Lahadalia	Penundaan pemilu memberikan kepastian investasi
Partai Politik	PAN	Pandemi Covid-19, situasi dan kondisi ekonomi yang belum stabil, meletusnya perang Rusia-Ukraina menyebabkan harga minyak naik, pembiayaan atau anggaran pemilu menjadi sangat besar, program pembangunan nasional tertunda karena imbas pandemi akibat bencana Covid-19.
	PKB	Penundaan pemilu agar momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu oleh pemilu
	PSI	Pencinta dan pengagum Jokowi
Masyarakat	M.Qodari dan Baron Danardono	Presiden tiga periode mampu menekan polarisasi di tengah masyarakat.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber media.

Hiruk pikuk menjelang tahun politik dinilai sebagai hal yang wajar. Ia muncul sebagai sebuah gejala perilaku sosial yang dipicu oleh berbagai faktor. Misalnya hiruk pikuk menjelang pemilu akan diwarnai dengan wacana-wacana politik yang penuh kepentingan dari masing-masing partai politik peserta pemilu. Ketiga contoh hiruk pikuk yang telah dijelaskan diatas hadir dalam konteks partai politik ingin terdaftar sebagai peserta pemilu dan dapat atau menjadi bagian dalam proses pencalonan calon presiden. Bagaimanapun hiruk pikuk yang terjadi mengonfirmasi bahwa demokrasi sedang berjalan dan menuju kearah kematangan atau demokrasi yang terkonsolidasi.

DOMINASI KAUM MILLENNIAL DAN GENERASI Z²⁴ : PEMILIH PENGGUNA INTERNET.

²⁴ Generasi Z disebut sebagai generasi internet yang memiliki karakteristik multitasking, misalnya menjalankan media sosial melalui ponsel sembari browsing menggunakan komputer dan mendengarkan musik menggunakan headset. Generasi ini memiliki ketergantungan dengan internet sekitar 88,4 persen dalam kehidupannya. Lihat laman www.kominfo.go.id

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis data tentang keberadaan kelompok pemilih yang didominasi oleh kelompok muda. Dalam rilisnya CSIS menyampaikan bahwa pemilu 2024 akan dipenuhi oleh generasi Z dan milenial berusia antara 17-39 tahun.²⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun. Itu berarti generasi milenial dan generasi Z bagian dari pemuda dan mereka punya hak pilih pada Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2022, perkiraan jumlah pemuda sebesar 65,82 juta jiwa.²⁶ Angka ini sangat signifikan untuk dimanfaatkan dalam kepentingan perolehan suara pada Pilpres 2024. Dengan menguasai pemuda kesempatan untuk menang Pilpres terbuka lebar. Pemuda menjadi aktor sentral memainkan peran dalam politik elektoral termasuk pemilihan presiden.

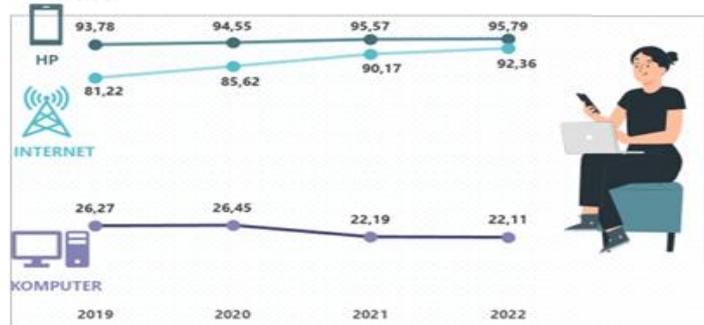


Pemuda dari generasi millennial dan generasi Z adalah aktor-aktor yang mumpuni dalam kehidupan teknologi internet. Kehidupan mereka sepenuhnya bersentuhan dengan dunia internet yang memungkinkan mereka menjangkau semua akses informasi dan menjalin komunikasi dengan siapa saja.

²⁵ Rilis ini disampaikan pada Kegiatan Diskusi Publik dan Survei Nasional “Pemilih Muda dan Pemilu 2024” pada tanggal 26 September 2022.

²⁶ Lihat Statistik Pemuda Indonesia 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Hal.vii.

Gambar 3.11 Persentase Pemuda menurut Akses Teknologi dan Informasi, 2019-2022



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019-2022

Pemuda dari generasi milenial dan generasi Z juga memiliki ketertarikan dengan dunia politik. Hal ini dibuktikan semakin banyaknya generasi ini terlibat dalam urusan-urusan politik misalnya terlibat dalam tim pemenangan salah satu calon presiden. Bahkan mereka turut serta dan aktif menjadi anggota partai politik. Diantara mereka diberi posisi strategis dalam jajaran kepengurusan partai. Pemuda telah menjadi elit partai politik yang diperhitungkan.

Kehadiran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bentuk nyata dari keterlibatan generasi ini dalam pentas politik nasional dan aktif mendorong kader-kader partai politik lainnya menjadi calon presiden. Bahkan seorang pentolan PSI diangkat menjadi wakil menteri pada pemerintahan Jokowi. Keterlibatan generasi ini dalam politik dan dukung mendukung calon presiden menjadi perhatian semua partai politik peserta pemilu. Mereka sangat dapat diandalkan menarik simpatik pemilih dari semua generasi. Keaktifan mereka dalam media sosial menghadirkan harapan besar untuk menarik massa pendukung bagi calon presiden.

Studi yang dilakukan oleh Zani dan Cicognani menunjukkan fakta yang terbalik terkait keaktifan dan ketertarikan pemuda dalam politik. Untuk pemuda di kawasan Eropa, umumnya tidak tertarik, tidak melibatkan diri terhadap isu-isu sosial politik. Kelompok pemuda ini lebih tertarik pada persoalan-persoalan di tingkat lokal seperti isu-isu seni graffiti, transportasi lokal dan masalah sampah serta persoalan-persoalan hak asasi manusia di tingkat internasional atau di level global. Mereka cenderung mengatasi isu-isu seperti ini dengan melakukan kegiatan dalam bentuk kegiatan sosial (*charitable activities*) dan melakukan demonstrasi dan petisi dari pada berpartisipasi dalam pemilu.²⁷

Untuk konteks pemuda di Indonesia, generasi ini menjadi influencer dalam menambah kantong perolehan suara calon presiden. Mereka sangat antusias mengikuti pemilu 2024. Hal

²⁷ Bruna Zani and Elvira Cicognani. 2019. *Young People as Engaged Citizens: A Difficult Challenge Between Disillusionments and Hopes*. Dalam *The Future of Digital Democracy: An Interdisciplinary Approach*, Springer., hal.2.

ini tergambar dari Riset Litbang Kompas. Secara garis besar survei tersebut menyatakan sebanyak 86,7% bersedia berpartisipasi dalam pemilu, 10,7% masih menimbang dan 2,6 % menolak mengikuti pemilu.²⁸ Selain itu, mereka mendambakan presiden dengan tiga karakter utama yaitu tegas 24,7 %, memahami kondisi negara 22,3 %, merakyat 19,1 %, aksi nyata 11,1 %, adil 10,6 %, jujur 7,2 %, bijaksana 7,2 % dan bertanggungjawab 6,8 %.²⁹

KREATIVITAS POLITIK BERBASIS TEKNOLOGI DAN KEMENANGAN ELEKTORAL.

Saat ini dunia sangat terhubung dengan jaringan internet yang tanpa batas. Segala bentuk aktivitas kehidupan terjadi dalam dunia yang tidak mengenal batas-batas waktu dan ruang. Dunia yang penuh dengan teks-teks dan gambar serta pesan dan komunikasi yang berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat jejaring di dunia maya. Dalam melakukan, membina dan menjalin komunikasi, orang tidak selalu mengandalkan cara-cara yang dianggap tradisional melainkan dengan menggunakan cara-cara yang dianggap lebih mampu menjangkau audiens secara lebih luas dan biasanya pola atau cara-cara seperti ini melibatkan kehadiran teknologi sebagai basis penunjang.

Aktivitas politik elektoral dalam dunia yang penuh teks-teks, gambar serta pesan dan komunikasi yang terkoneksi di dunia digital ada tampaknya menjadi keniscayaan. Dalam konteks aktivitas politik elektoral yang didominasi kelompok pemuda yang merupakan generasi milenial dan generasi Z, kreativitas politik berbasis teknologi menjadi penentu kemenangan elektoral. Dalam Pileg 2019, salah seorang caleg memanfaatkan media sosial sebagai strategi kemenangan elektoralnya dan mendapatkan perolehan suara cukup signifikan sehingga ia terpilih menjadi anggota DPR RI termuda.³⁰

Inovasi terbesar dalam politik digital salah satunya adalah kampanye politik dengan menggunakan perangkat teknologi yang terkoneksi dengan jaringan internet. Partai politik dalam usahanya mencari anggota partai mengandalkan berbagai media sosial yang terkoneksi dengan internet. Dengan dominasi kelompok pemuda yang paham dan mumpuni atas teknologi internet dan memiliki keterkaitan dengan isu-isu politik termasuk Pilpres maka partai politik

²⁸Lihat, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/04/08/87-persen-milenial-dan-generasi-z-antusias-ikuti-pemilu-2024>

²⁹ ibid.

³⁰ Salah satu bentuk kreativitas politik berbasis teknologi adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk kepentingan politik elektoral, Salah seorang anggota DPR RI terpilih, Hillary Brigitta Lasut, daerah pemilihan Sulawesi Utara mampu menjangkau jauh lebih banyak pemilih muda dan berhasil meraup 70.345 suara. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34036/politik-digital-anak-muda/0/artikel>.

harus lebih membidik keberadaan mereka dan tidak menempatkan mereka sebagai kekuatan alternatif melainkan kekuatan utama sebagai penentu kemenangan dalam ajang pilpres.

Teknologi sebagai senjata politik menjadi sebuah ungkapan dan bentuk kreativitas berpikir generasi milenial dan generasi Z dalam kompetisi elektoral pemilihan presiden. Mereka menempatkan cara bertindak tradisional dengan menuntut adanya pertemuan-pertemuan langsung untuk kegiatan-kegiatan kampanye politik merupakan cara bertindak yang telah ketinggalan jaman dan kurang dapat diandalkan bahkan cenderung ditinggalkan. Teknologi mengambil alih semua aktivitas politik. Inilah alasan mengapa partai politik di Indonesia hampir semua menggunakan teknologi internet dalam aktivitasnya. Partai politik semakin merambah jauh dalam pemanfaatan peranti-peranti digital baru, memanfaatkan konsultan politik yang canggih dalam mengutak-atik mahadata.³¹ Tidak saja sampai disini, partai politik berubah menjadi partai digital yang memanfaatkan piranti-piranti digital dalam pengorganisasian khalayak.³²

Hubungan pemanfaatan teknologi internet dengan kemenangan elektoral dalam Pilpres tidak saja terjadi di Indonesia seperti yang dialami oleh PDIP dan beberapa partai politik lainnya yang mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden, tetapi juga terjadi di luar negeri sebagaimana ditunjukkan oleh Barack Obama oleh Partai Demokrat pada pemilihan presiden tahun 2012 dan Donald Trump dalam pemilihan presiden di Amerika tahun 2016 oleh Partai Republik. Jokowi, Barack Obama dan Donald Trump adalah contoh yang baik untuk melihat bagaimana teknologi internet dapat membawa kemenangan politik kepada mereka, terlepas apakah pemanfaatan dan penggunaan teknologi internet tersebut mengindahkan etika atau tidak.

KESIMPULAN

1. Teknologi internet menjadi sebuah keniscayaan dalam setiap aspek kehidupan manusia termasuk dalam kompetisi elektoral khususnya Pemilihan Presiden Tahun 2024;
2. Politik digital melalui pemanfaatan teknologi internet memegang peran sentral dalam kemenangan elektoral partai politik di Pilpres 2024;
3. Kelompok pemuda yang merupakan generasi milenial dan generasi internet atau Z adalah generasi yang memiliki kecakapan mumpuni dalam memanfaatkan teknologi

³¹ M.Alfan Alfian.2022. *Demokrasi Digital: Manusia Teknologi dan Kontestasi*, Penjuru Ilmu, hal.199.

³² *ibid.*,hal.1999.

internet dalam keseharian hidupnya termasuk dalam aktivitas politik di Kampanye Pilpres;

4. Penggunaan teknologi internet tidak steril dari kemunculan kejahatan elektoral sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat. Perihal yang sama dapat pula terjadi di Indonesia menjelang pemilihan presiden tahun 2024.

REFERENSI

Buku dan Jurnal

-----M.Alfan Alfian.2022. *Demokrasi Digital: Manusia Teknologi dan Kontestasi*, Penjuru Ilmu.

-----Haryadi Didik Santoso (Ed) dan Budianto Heri Dr.,M.Si (Pengantar).2018. *Media dan Komunikasi Politik: Potret Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Komunikasi Politik*, MBridge Press.

-----Anstead Nick and Chadwick Andrew .2009. *Parties, Election Campaigning and the Internet*, Routledge International Handbooks.

-----Richard Davis, Jody, Peter and Jonathan S. Morris.2009. *The Internet in the U.S. Election Campaigns. Routledge Handbook of Internet Politics*.

-----Sudibyo Agus.2019. *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*, Kepustakaan Populer Gramedia..

----- Schmidt Eric & Cohen Jared.2014. *The New Digital Age: Cakrawala Baru Negara, Bisnis dan hidup kita*, KPG.

-----Statistik Pemuda Indonesia 2022. Badan Pusat Statistik.

-----Wooley Samuel and Howard Philip .2019. *Computational Propaganda Worldwide*, Oxford University Press.

----- Zani Bruna and Cicognan Elvirai.2019.*Young People as Engaged Citizens: A Difficult Challenge Between Disillusionments and Hopes*.

Situs Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2017/10/18/11155931/anies-baswedan-diminta-tak-bermain-politik-identitas>.

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/34036/politik-digital-anak-muda/0/artikel>.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/04/08/87-persen-milenial-dan-generasi-z-antusias-ikuti-pemilu-2024>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/23/06160021/parpol-tak-lolos-pemilu-minta-tahapan-pemilu-2024-dihentikan>.

<https://populis.id/read16881/kendati-tendensius-dan-menyerang-pribadi-kritik-amien-rais-buat-jokowi-luhut-diapresiasi-substansinya-bagus>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/17/18410901/sby-saya-harus-turun-gunung-ada-tanda-tanda-pemilu-2024-bisa-tidak-jujur>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/02/13504991/presiden-jokowi-pengusul-presiden-3-periode-ingin-menampar-muka-saya?page=all>

www.kpu.go.id

www.kominfo.go.id

www.bps.go.id

www.setkab.go.id